

**EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK UMKM TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19*
PADA WILAYAH KPP PRATAMA MALANG UTARA**

SKRIPSI



Oleh

SITI RUVI MAYWULAN SAFITRI

NIM : 17520072

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK UMKM TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19*
PADA WILAYAH KPP PRATAMA MALANG UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



O l e h

SITI RUVI MAYWULAN SAFITRI

NIM : 17520072

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK UMKM TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19*
PADA WILAYAH KPP PRATAMA MALANG UTARA**

SKRIPSI

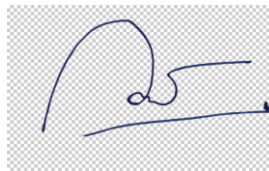
O l e h

SITI RUVI MAYWULAN SAFITRI

NIM: 17520072

Telah disetujui pada tanggal 20 Juni 2021

Dosen Pembimbing



**Sri Andriani, SE., M.Si
NIP: 197503132009122001**

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

**Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP. 19720322-200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN
EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK UMKM TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19*
PADA WILAYAH KPP PRATAMA MALANG UTARA

SKRIPSI

Oleh

SITI RUVI MAYWULAN SAFITRI

NIM : 17520072

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 26 Juli 2021

Susunan Dewan Penguji:

Tanda tangan

1. Ketua

Fatmawati Zahro, M.S.A

NIP: 198602282019032010

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si

NIP: 197503132009122001

3. Penguji Utama

Isnan Murdiansyah, SE., M.SA

NIP: 198607212019031008



Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Ruvi Maywulan Safitri
NIM : 17520072
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK FINAL UMKM TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA WILAYAH KPP PRATAMA MALANG UTARA

Adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari pihak lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dn tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 7 Juni 2021

Hormat saya,



Siti Ruvi Maywulan Safitri

NIM : 17520072

MOTTO

“Tuhanku, puaskanlah aku dengan aturan-Mu daripada aturanku sendiri dengan pilihan-Mu daripada pilihanku sendiri.

**Dudukkanlah aku ditempat-tempat kebutuhanku yang
sesungguhnya”.**

~Ibnu 'Athaillah

**“Jangan memberi batasan pada kesabaran
karena sabar tidak ada batasan”**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Efektivitas Insentif Pajak Final UMKM terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara”.

Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Haris, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., selaku ketua jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa memberikan ilmunya.
6. Kepada bapak, ibu, adik keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya secara moril maupun spiritual.
7. Kepada Bpk Andik terima kasih karena membantu pemberian data untuk penyelesaian skripsi.
8. Teman-teman terdekat saya Fuad, Berlian, Zulfa, Melisa, Desya dan Dhining yang selalu memberikan semangat memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas terakhir.

9. Untuk diri sendiri terima kasih yang telah berhasil berjuang sampai akhir dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan ini masih jauh dari belum dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharpkan kritik dan saran demi kesempurnaan, penulis berharap semoga bermanfaat dengan dengan baik bagi semua pihak *Ammin Ya robbal alamin.* “

Malang, 21 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRAC.....	xiii
المخلص	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitiam	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teori	10
2.2.1 Teori Pajak	10
2.2.2 Objek pajak Subjek Pajak	12
2.2.3 Jenis – jenis Pajak	14
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.2.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	18

2.2.6 Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	18
2.2.7 Kepatuhan Pajak.....	20
2.2.8 Teori Efektivitas	21
2.2.9 Pajak Dalam Prespektif Islam	22
2.3 Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Data dan Jenis Data.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Analisis Data.....	28
3.5.1 Pengujian Instrumen.....	28
3.5.2 Analisis Deskriptif.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	31
4.1.1 Deskripsi Responden	32
4.2 Analisis Data.....	35
4.2.1 Analisis Deskriptif.....	35
4.2.2 Rasio Efektivitas	40
4.2.3 Uji Instrumen	44
4.2.3.1 Uji Validitas	43
4.2.3.2 Uji Reliabilitas.....	45
4.3 Pembahasan hasil Analisis	45
4.3.1 Efektivitas Insentif Pajak Final UMKM.....	46
4.4 Kendala Penelitian	47
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2 Klasifikasi UMKM.....	18
Tabel 3.1 Interpretasi Efektivitas.....	33
Tabel 4.1 Paparan Kuisisioner	34
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Pelaku Responden	35
Tabel 4.3 Jenis Usaha Pelaku Responden	36
Tabel 4.4 Omset Pelaku Responden	37
Tabel 4.5 Wilayah Kerja Responden.....	37
Tabel 4.6 Frekuensi Jawaban Responden.....	39
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.9 Data UMKM	45
Tabel 4.10 UMKM Pemohon Insentif Pajak.....	46
Tabel 4.11 Hasil Rasio Efektivitas	47
Tabel 4.12 Interpretasi Hasil Efektivitas	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	26
Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden	35
Gambar 4.2 Jenis Usaha Responden	36
Gambar 4.3 Omset Responden.....	37
Gambar 4.4 Wilayah Responden.....	38
Gambar 4.5 Tingkat Efektivitas.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisioner Penelitian	57
Lampiran 2 Hasil Jawaban Responden	58
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Insentif Pajak	60
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak	61
Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas.....	62
Lampiran 6 Biodata Penelitian	63

ABSTRAK

Siti Ruvi Maywulan Safitri. 2021, SKRIPSI. Judul: “Efektivitas Insentif Pajak Final UMKM terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi *Covid-19* pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Insentif Pajak, UMKM, Kepatuhan Pajak, Efektivitas

Meluasnya kasus pandemi *covid-19* pasti memiliki dampak tak terkecuali pada bidang ekonomi, di Indonesia sendiri mengalami kemunduran ekonomi dan berdampak pada perpajakan. Untuk tetap menaikkan perekonomian khususnya untuk para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dikarenakan UMKM merupakan sumber ekonomi yang vital. Dengan itu pemerintah berupaya untuk membantu UMKM dalam meringankan kewajiban pajaknya dan tetap menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *covid-19*. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03 tahun 2020 bertujuan untuk memberikan insentif pajak dan final untuk para UMKM dengan tetap menaikkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari program yang diberikan pemerintah kepada para UMKM dimasa pandemi khususnya pada wilayah KPP Pratama Malang Utara dari bulan April hingga bulan Desember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang digunakan data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa terdapat dua bulan di bulan April dan Desember dikatakan Tidak Efektif karena persentase kurang dari 60%. Empat bulan pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus dikatakan Sangat Efektif dengan tingkat persentase lebih dari 100%. Tiga bulan lainnya yakni bulan September, Oktober dan November dikatakan Kurang Efektif karena tingkat persentase lebih dari 60%.

ABSTRACT

Siti Ruvi Maywulan Safitri. 2021, THESIS. Title: "Effectiveness of Small Medium Enterprise Final Tax Incentives on Tax Compliance in the Covid-19 Pandemic Period in the KPP Pratama Nort Region"

Supervisor : Sri Andriani,SE.,M.Si

Keyword : Tax Incentives, Small Medium Enterprise (SME), Tax Compliance, effectiveness

The widespread case of the Covid-19 pandemic must have had an impact on the economy, Indonesian it self experienced an economic setback and had an impact on taxation. To continue to improve the economy, especially for Small Medium Enterprise (SME), because SME are vital economic source. With this, the goverment seeks to assist SME in easing their tax obligations and keep increasing the level of taxpayer compliance during the covid-19 pandemic the issuance of Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.03 of 2020 to provide final and tax incentives for SME while still increasing tax compliance.

The study aims to determine the level of effectiveness of the program provided by the pandemic, especially in the KPP Pratama North Malang area form April to December. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach, the data used are primary data and secondary data.

The results of the study show that there are two months in April and December that are ineffective because the percentage is less than 60%. The four months of May, June, July and August are More Effective with a percentage rate of more than 100%. The other three months in September, October and November are is less effective because the percentage rate is more than 60%.

الملخص

سيتي روفي ميولن سفتري ، ٢٠٢١ . البحث الجامعي , "فعالية الحوافز الضريبية النهائية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الامتثال الضريبي أثناء جائحة كوفيد -19 في ولاية مكتب الضرائب فراتاما فقراء الشمل

مشرفة : سري أندرياني الماجستير

الكلمات مرشدة: الحوافر الضريبية, المشاريع الصغيرة والمتوسطة, الالتزام الضريبي, فاعلية .

كوفيد -19 سيكون له تأثير على الاقتصاد, في اندونيسيا نفسها تعاني من ت المؤكد أن انتشار حالات جائحة هور اقتصادي ولها تأثير علي الضرائب . الاستثمار في تحسني الاقتصاد وخاصة للمؤسسات متناهية الصغر و الصغرة والمتوسطة لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مورد الاقتصادي حيوي . مع ذلك , تحاول الحكومة المساعدة , المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تخفيف التزاماتهم الضريبية والاستمرار في زيادة مستوى امتثال دافعي الضرائب خلال جائحة كوفيد -19 . اصدار وزير المالية لائحة رقم 03/ 44 عام 2020 الى تقديم حوافز الضريبية ونهاية , المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع زيادة الامتثال الضريبي .

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى فاعلية البرامج التي تقدمها الحكومة للدولة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة , وخاصة في ولاية مكتب الضرائب فراتاما فقراء الشمل من أبريل إلى ديسمبر . الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة النوعية مع المنهج الوصفي , والبيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن هناك شهرين في أبريل وديسمبر يقال أنهما غير فعالين لأن النسبة أقل من 60 % . في أربعة أشهر في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس يقال أنها فعالة جدًا بنسبة مئوية تزيد عن 100 %. ويقال إن الأشهر الثلاثة الأخرى وهي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر أقل فعالية لأن النسبة المئوية تزيد عن 60 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus disease* pada tahun 2019 atau lebih tepatnya dikenal dengan *covid-19* telah berhasil membuat seluruh dunia geger dengan kemunculannya, hampir seluruh manusia di belahan dunia mendadak heboh dengan munculnya pandemi *covid-19*, tidak terkecuali dengan Indonesia. Seperti yang dituliskan oleh Utomo (2020) dalam kompas, Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Dirjen *World Health Organization* (WHO) mengumumkan dan menetapkan bahwa *covid-19* sebagai pandemi secara global sejak tanggal 11 Maret 2020. Penyebaran dan penularan *covid-19* dapat dikatakan sangat cepat dan signifikan, hal ini menimbulkan kekhawatiran seluruh masyarakat dunia. Merujuk artikel yang ditulis Rizal (2020) berdasarkan data dari *Worldometers* telah terhitung hingga tanggal 21 Desember 2020, sebanyak 77.133.709 kasus *covid-19*, sebanyak 1.698.851 orang dinyatakan meninggal karena *covid-19*, dan sebanyak 54.029.778 orang dinyatakan sembuh dari *covid-19*.

Demi mencegah penyebaran pandemi *covid-19* yang semakin tinggi, banyak sejumlah pemerintah negara menutup kawasan negaranya dalam hal apapun seperti pariwisata, ekonomi dan sosial. Pembatasan wilayah atau biasa dikenal dengan sebutan *lockdown* dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan penyebaran pandemi *covid-19*. Pembatasan wilayah atau *lockdown* sangat berdampak terutama pada perekonomian

negara. Seperti yang dijelaskan oleh Wiguna (2020) dalam tulisannya hampir seluruh negara mengalami dampak pemberlakuan lockdown. Dampak dari pandemi *covid-19* ini sangat serius, dan tidak dapat dihindari, semua ketahanan dan kesiapan negara dalam hal ekonomi, sosial, dan kesehatan benar-benar diuji dalam menghadapi pandemi *covid-19*. Tidak hanya kesehatan para warga negara saja yang harus disiapkan, namun juga penting halnya ekonomi negara juga harus benar-benar menyiapkan keuangan negara untuk menghadapi situasi pandemi *covid-19*.

Selama berberapa dekade ekonomi Indonesia melambat bahkan terhenti sejenak karena adanya pandemi *covid-19*. Merujuk artikel yang ditulis oleh Fitriani (2020) Badan Pusat Statistika (BPS) telah mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia telah mengalami perlambatan ekonomi pada kuartal I/2020 sebesar 2,9%, dan dinyatakan menurun bila dilihat dari kuartal IV/2019 yang telah tercatat minus 2,41% hal ini diumumkan oleh Suhariyanto sebagai Kepala BPS. Beberapa saham dan perdagangan di seluruh dunia mengalami penurunan, di Indonesia sendiri banyak usaha-usaha yang mengalami defisit karena pemberhentian ekonomi karena pemberlakuan *lockdown* di Indonesia, hal ini yang menyebabkan melemahnya perekonomian Indonesia dan keuangan negara.

Pada dasarnya pajak adalah kontribusi masyarakat yang disetorkan kepada kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak, pajak ini bersifat memaksa, dan manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung. Namun setelah adanya pandemi *covid-19* banyak para wajib pajak, seperti pengusaha,

karyawan, hingga pedagang yang mengalami ketidak stabilan ekonomi. Melebarnya kasus *covid-19* yang berdampak pada melemahnya perekonomian di Indonesia tentu saja berdampak pada penerimaan pajak Indonesia yang mengalami perlambatan dan tidak dapat memenuhi target realisasi penerimaan pajak, hal ini diperkirakan sampai akhir tahun 2020.

Semakin melemahnya ekonomi Indonesia maka penerimaan pajak juga akan mengalami penurunan, ditambah lagi pemerintah telah menggelontorkan dana untuk insentif pajak sampai sebesar Rp123,01 triliun sehingga membuat penerimaan pajak semakin merosot. Rendahnya penerimaan pajak membuat pemerintah harus memutar otak demi menaikkan perekonomian Indonesia. Terlihat per tanggal 30 April 2020 realisasi penerimaan pajak hanya sejumlah 376,67 triliun, ini hanya 30% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang mengalami perlambatan penerimaan pajak 3,1% (Siregar-2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM juga merupakan wadah bagi para masyarakat yang memiliki kreatifitas. Terguncangnya ekonomi saat ini karena adanya pandemi *covid-19* membuat khawatir karena perannya dalam perekonomian di nilai penting. Tidak sedikit dari para pelaku UMKM mengalami kemunduran ekonomi. Sisi lain UMKM merupakan alat penggerak ekonomi yang sangat cepat dalam memajukan

perekonomian, hal ini harus dipertahankan ditengah – tengah pandemi saat ini. Demi memotivasi para pelaku UMKM untuk tetap patuh pajak maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk para UMKM melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui PP 23 semula para pelaku UMKM dibebankan pajak sebesar 1% kemudian berubah menjadi 0,5% peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 dikeluarkan dan disahkan sebelum terjadinya pandemi *covid-19*.

Seiring melebarnya kasus pandemi membuat pemerintah mengeluarkan undang-undang baru terkait insentif pajak. Tak terkecuali untuk para pelaku UMKM juga diberikan insentif pajak. Melalui PMK Nomor 44/PMK.03/2020 telah diputuskan bahwa insentif pajak final yang semula diberikan untuk UMKM dengan besaran 0.5% kini mendapatkan insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP). Maka dari itu para pelaku UMKM tidak perlu lagi menyetor dan tidak memotong atau memungut pajak bagi para pelaku UMKM. Semua pajak final yang ditetapkan untuk para UMKM dibebaskan dengan mengikuti aturan-aturan, pembebasan ini diberlakukan mulai dari bulan April hingga bulan Desember 2020 dan terus diperpanjang sampai bulan Februari sampai Juni 2021. Mengharap bahwa para UMKM tetap stabil dalam menjalankan perkonomiannya, sehingga dapat membuat para pelaku UMKM tetap sadar dan patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Bertempat pada KPP Pratama Malang Utara telah memberikan informasi pada para wajib pajak UMKM bahwa telah diberlakukannya

insentif pajak final ditanggung pemerintah untuk para UMKM melalui media sosial. Dengan menggunakan media sosial diharapkan para UMKM dapat dengan mudah melihat dan memahami terkait program yang diberikan pemerintah saat ini.

Mengacu pada latar belakang tersebut terkait tingkat efektif dari kepatuhan wajib pajak di saat masa pandemi seperti ini dapat dilakukan secara maksimal, seperti dengan meningkatkan dan memaksimalkan diberlakukannya insentif pajak final ditanggung pemerintah untuk para UMKM. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19** Pada KPP Pratama Malang Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dari itu rumusan masalahnya adalah seberapa besar efektivitas adanya program insentif pajak PPh Final Ditanggung pemerintah yang diberikan pada pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi covid-19 khususnya di KPP Pratama Malang Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui besarnya nilai efektivitas insentif pajak PPh Final yang ditanggung pemerintah pada pelaku UMKM

terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Malang Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan tentang pemahaman wajib pajak terkait dengan efektivitas program insentif pajak untuk pelaku UMKM dan keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak negara di masa pandemi *covid-19*. Selain itu diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sebagai pengembangan penelitian yang berhubungan dengan pemberlakuan insentif pajak terkait pengaruh kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

Peneliti dapat memahami seberapa efektif dari pemberlakuan insentif pajak orang pribadi pada penerimaan pajak di masa pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Malang Utara.

Pemerintah dapat menjadikan penelitian ini tolok ukur terkait pemeberian insentif pajak pada para UMKM sudah tergolong efektif atau perlu menambah bahkan memperbaiki peraturan dan pemberian insentif pajak.

Pelaku UMKM khususnya di KPP Pratama Malang Utara dapat memahami dan memanfaatkan pemberian insentif pajak final ditanggung Pemerintah dan dapat membantu perekonomian UMKM dimasa pandemi saat ini.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas, maka penelitian ini berfokus pada hal-hal yang relevan saja. Penelitian ini membuat batasan penelitian yaitu hanya meneliti terkait tingkat efektivitas dari pemberian program insentif pajak PPh Final yang ditanggung oleh pemerintah untuk pelaku UMKMKhususnya pada insentif pajak jilid 1 yang dikeluarkan dan diberlakukan selama masa pandemi *covid-19* yang khususnya pada KPP Pratama Malang Utara ntuk mengetahui dapat meningkatkan jumlah kepatuhan pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang telah dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun	judul penelitian	Variabel/ Fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Yotasa Ra'ida Khariyah, dan Muhammad Heru Akhmadi (2019)	Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara.	Kepatuhan pajak dan Penerimaan pajak negara	Kualitatif deskriptif	PPh Final atas penghasilan untuk peredaran bruto tertentu sebesar 0,5% dikalikan dengan omzet. Tujuan dari adanya peraturan insentif pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya pelaku UMKM. Diperakukan peraturan tersebut dibuktikan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar meskipun peningkatannya belum optimal.
2.	Ahmad Jarnuzi, Rika Wijayanti, dan Annisa Fitriana. (2020)	Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.23 Th 2018.	Kepatuhan Pajak	Kuantitatif Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian insentif pajak Final telah berhasil meningkatkan pertumbuhan wajib pajak di KPP Pratama Wonosari Gunungkidul. 2. Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% membuat penurunan kontribusi penerimaan pajak UMKM. 3. Efektivitas PPh Final UMKM telah dibandingkan bahwa penerimaan dan target setelah adanya penurunan tarif menjadi 0,5% menjadi efektif dengan hasil prosentase 88,11%
3.	Sinta Ustantini, Moh. Amin, dan Junaidi (2021)	Efektivitas Penerapan Insentif Pajak PMK 44 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Pemulihan <i>Cash Flow</i> .	Cash Flow Perusahaan	Deskriptif Komparatif Kuantitatif	Penurunan tarif pajak Final UMKM menurut PMK 44 tahun 2020 dapat memulihkan <i>cash flow</i> dari PT ABC sekitar 1,4% dengan jumlah besaran Rp8.834.920, dan mampu meningkatkan besaran laba PT.ABC sebesar Rp9.858.428 dengan prosentase kisaran 7%.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, tahun	judul penelitian	Variabel atau fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
4.	Lili Marlinah, Syahribulan (2020)	Peranan Insentif Pajak yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi.	Pemulihan Ekonomi Bangsa.	Studi literatur	Diberlakukannya insentif pajak di tanggung pemerintah diambil karena untuk menghadapi penurunan ekonomi karena adanya pandemi covid-19. Program yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional dan dapat segera menstabilkan sistem keuangan negara. Adanya sosialisasi insentif pajak mengharap menambah ruang gerak para UMKM dalam dalam sektor usahanya.
5.	Nabilah Jasmin Prasmaning Putri, Syaiful Iqbal (2020)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 tahun 2018	Kepatuhan pajak	Kuantitatif komparatif	Setelah melalui proses penelitian dengan menggunakan <i>paired simple t-test</i> hasil yang diperoleh keptuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak setelah adanya insentif UMKM meningkat. Selain itu kenaikan juga lebih meningkat pada hal kepatuhan membayar pajak, dan dalam kepatuhan pelaporan SPT mengalami peningkatan dan lebih baik dari sebelumnya.
6.	Handika Kusuma, Lukman Hakim, Agus Nugroho, Yolanda, Suyanti Kasimin, dan Widyawati (2020)	Efektifitas Program Pemberi Keringanan Insentif Pajak Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kecamatan Kranggan).	pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.	Deskriptif - kuantitatif	Dari pemberian insentif pajak daerah untuk kendaraan bermotor yang dimulai dari bulan 23 Oktober 2017 sampai dengan 28 Desember 2017. Penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah adanya insentif pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan penerimaan pajak terbesar pada bulan Desember tahun 2017. Lebih besar dibandingkan dengan bulan – bulan sebelumnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan para responden memberikan respon positif hingga memiliki skor total 76%. Sekitar 8% responden tidak setuju terkait adanya sosialisasi pemberian insentif pajak kendaraan bermotor, karna masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya informasi tersebut.
7.	RD Kusyeni, Nur Sari, Ratih Kumala, dan Zainal Arifin Yurdani (2021)	Efektifitas Program <i>Earmarking Tax</i> Atas Pajak Rokok Untuk Kesadaran Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	<i>Earmarking tax</i> atas pajak rokok	Kualitatif	Dengan menggunakan teori dari Richard M Steers untuk menganalisa faktor-faktor yang memperngaruhi efektivitas program <i>earmarking tax</i> dan faktor yang paling mempengaruhi efektivitasnya adalah faktor dari karektistik organisasinya. Dan dari penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa karakteristik organisasi dapat dinilai efektif.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, tahun,	judul penelitian	Variabel atau fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
8	Monita Pricilia Najoan, Jenny Morasa, dan Heince R.N. Wokas	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kota Mobagu	Penerimaan PPN	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan pengujian menggunakan rasio efektivitas penagihan tunggakan pajak PPN dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2012-2014 memiliki prosentase dibawah 60% dimana dapat diartikan dan diklasifikasikan tidak efektif. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan terhadap tunggakan pajak tergolong kurang karena hanya mendapatkan hasil prosentase 0,00% - 10% saja.
9.	Miguel de Araujo, Ni Luh Putu Wiagustini, dan IB Anom Purbawangsa (2018)	Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili.	Penerimaan daerah.	Deskriptif-kuantitatif	Efisiensi Penerimaan Daerah dari tahun 2005 sampai tahun 2012 memiliki rata-rata 71,48% yang dinilai efisien dari realisasi penerimaan daerah lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target. Dan untuk tingkat efektivitas mencapai lebih dari 100% dan dapat dikatakan bahwa pengelolaan pendapatan kabupaten Dili sangat efektif.
10.	Sunanto (2016)	Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan	Penerimaan pajak	Analisis Deskriptif	Hasil dari rasio efektivitas penerimaan pajak UMKM dari tahun 2013 dinyatakan kurang efektif, dan untuk tahun 2014 dan 2015 dinyatakan tidak efektif. Sedangkan untuk kontribusi penerimaan pajak UMKM dari tahun 2013 – 2015 dinilai masih sangat kurang. Untuk laju pertumbuhan dari penerimaan pajak mengalami kenaikan, namun hal tersebut tidak sebanding jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini memiliki persamaan karena membahas terkait efektivitas penerimaan pajak di masa pandemi *covid-19* yang berhubungan insentif pajak. Penelitian ini juga memiliki perbedaan terkait objek pajak, dan metode penelitian, selain itu penelitian yang akan dilakukan akan mengaitkan dengan pandangan islam dalam penelitiannya.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pengertian pajaknya adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat manfaatnya secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki tugas sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan perpajakan menurut undang-undang yang telah berlaku.

Menurut Prof Dr.P.J.A. Andriani yang telah menjelaskannya dalam pajak adalah iuran kepada negara yang mendapat paksaan yang wajib dibayarkan sesuai dengan peraturan-peraturan berlaku, dengan tidak mendapat haknya kembali secara langsung dapat ditunjuk, dan pajak berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara yang nantinya berhubungan dengan tugas Negara yang diselenggarakan pemerintah. Mardiasmo (2011:23) telah menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negaranya yang dapat dikatakan utang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan harus dibayarkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tanpa harapan imbalan dapat

dirasakan secara langsung dan pajak digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyatnya.

Intinya pajak adalah kontribusi masyarakat dan juga merupakan penghilang harta yang batil bagi menurut para muslim. Penerimaan pajak dari masyarakat nantinya akan menjadi anggaran negara untuk dijadikan pengembangan dan pembangunan infrastruktur negara sebagai kemajuan dan berkembangnya negara. Pajak sendiri juga berhubungan langsung pada pemerintah negara atau dalam istilah arab biasa disebut dengan *ulul amri* atau penguasa yang berhak mengatur pajak negara.

Pajak sendiri memiliki peranan dan fungsi penting dalam kehidupan sebuah negara sebagai pembangunan dan perkembangan infrastruktur sebuah negara, menurut artikel yang dimuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dari beberapa sumber pengetahuan sendiri pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Berikut beberapa fungsi dari pajak menurut artikel DJP antara lain yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Anggaran)

Negara memerlukan pajak sebagai kebutuhan anggarannya untuk menutupi segala pengeluaran-pengeluaran negara. Beberapa contohnya yaitu untuk membiayai pembangunan infrastruktur negara. Hendaknya penerimaan pajak dari tahun ke tahun harus mengalami kenaikan hal ini dikarenakan pembiayaan untuk pembangunan negara cenderung semakin naik.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Dengan adanya pajak dalam suatu negara maka ini dapat mempermudah pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi di negaranya dengan mengatur kebijakan pajak dalam negaranya.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk menstabilkan peredaran uang dalam suatu negara, sehingga tidak dapat menyebabkan inflasi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dengan adanya pemungutan pajak yang nantinya akan dikumpulkan sebagai biaya pembangunan negara yang nantinya akan membuka peluang kerja bagi para masyarakatnya dana otomatis akan terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakatnya.

2.2.2 Objek Pajak Subjek pajak

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan yang termasuk dalam perubahan keempat dari UU Nomor 7 tahun 1983, yang disebut objek pajak adalah setiap adanya tambahan ekonomis yang diterima atau didapatkan oleh wajib pajak maka itu bisa disebut dengan objek pajak. Sedangkan Subjek pajak adalah orang pribadi, badan, warisan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berikut yang termasuk dalam subjek pajak :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari selama kurun waktu 12 bulan.
- b. Usaha badan yang didirikan di Indonesia, kecuali instansi pemerintahan yang sumber pembiayaannya dari anggaran negara atau anggaran daerah.
- c. Warisan belum terbagi

2. Subjek Pajak Luar Negeri yaitu orang pribadi tidak tinggal di Indonesia selama kurun waktu 183 hari atau lebih dan tidak mendapat penghasilan atau laba dari Indonesia.

3. Bentuk Usaha Tetap yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, namun usahanya berdiri dan berkedudukan di Indonesia. seperti, kantor cabang, pabrik, gudang.

Berikut yang termasuk dalam objek pajak penghasilan :

- 1. Imbalan dari pekerjaan dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak yang berupa upah, gaji, honorarium, uang pensiun, komisi, bonus, tunjangan.
- 2. Hadiah atau undian yang diperolehnya dari penghargaan
- 3. Laba usaha
- 4. Keuntungan dari penjualan barang yang termasuk dalam harta wajib pajak
- 5. Deviden dan royalti

6. Penghasilan dari sewa
7. Selisih mata uang asing, Surplus Bank Indonesia
8. Keuntungan dari pembebasan utang
9. Premi asuransi
10. Tambahan penghasilan yang belum terkena pajak
11. Dan yang termasuk dalam penghasilan yang dikenakan pajak final seperti bunga deposito, hadiah.

2.2.3 Jenis-jenis Pajak

Dari beberapa aspeknya pajak memiliki banyak jenisnya, pajak dapat dilihat dari sifat pajak, pemungut pajak, objek pajak dan bahkan dapat dilihat dari subjek pajaknya. Resmi (2019) dalam tulisannya menggolongkan jenis-jenis pajak yakni :

1. Pajak berdasarkan Golongan
 - a. Pajak Langsung (Direct Tax) adalah pajak yang secara langsung telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang pengenaanya tidak dapat dialihkan dan pajak ini harus dibayarkan sesuai dengan surat ketetapan pajaknya.
 - b. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) kebalikan dari pajak langsung, dalam pajak tidak langsung ini pajak yang dikenakan bisa dilimpahkan atau dapat dibebankan pada orang lain.

2. Pajak menurut dari sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang dasar pengenaannya berdasarkan keadaan dari wajib pajaknya.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan pada objeknya, seperti benda, peristiwa dan keadaan tanpa peduli keadaan dari wajib pajaknya.

Dalam buku perpajakan yang ditulis Widyaningsih (2016:3) menurutnya pajak terbagi menjadi 2 yakni :

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat seperti Direktorat Jenderal Pajak sampai departemen keuangan. Yang termasuk dalam pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah tentu berbeda dengan pajak pusat, dimana pajak daerah pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah baik Provinsi atau Kota. Maka dari itu pajak yang termasuk kedalam pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak hiburan dan tontonan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1994, dan sistem pemungutan pajak memiliki 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System (OAS)*

Official assessment system yang lebih dikenal dengan sebutan sistem penetapan pajak yang dilakukan oleh administrasi pajak. Sistem ini telah dikenal dan digunakan di Indonesia semenjak zaman penjajahan. Pada sistem pemungutan ini petugas pajak memiliki kewenangan sepenuhnya terkait perhitungan dan pemungutan pajak bagi para wajib pajak yang tidak dapat melakukan perhitungan pajaknya. Sistem ini biasanya digunakan pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lebih merujuk pada pajak daerah. Hanya saja semenjak tahun 1984 *official assessment system* tidak diberlakukan lagi di Indonesia.

2. *Self Assessment System*

Self assessment system berbeda dengan sistem sebelumnya, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam mendaftar hingga melaporkan pajak mereka sendiri. Dalam sistem ini peran pemerintah hanya sebagai pegawai dalam perpajakannya. Sistem ini biasa digunakan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan adanya *self assessment*

system wajib pajak menjadi lebih mudah dan lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

3. *Withholding System*

Withholding system adalah sistem yang melibatkan pihak ketiga yang menentukan besaran pajak dan dalam pemungutannya. Jadi hal ini memudahkan wajib pajak dan juga pemerintah dalam melakukan kegiatan pajaknya. Sistem pemungutan ini dimuat dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 24, dikutip dari web Direktorat Jenderal Pajak penggunaan *withholding system* dinilai lebih efektif dan efisien karena penerimaan pajak pada kas negara lebih cepat. Selain itu menggunakan *withholding system* dapat menstimulus kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak perlu repot dalam menghitung dan melaporkan pajaknya karena adanya bantuan dari pihak ketiga. Menurut Resmi (2017) pihak ketigalah yang membedakan dari *withholding system* dengan *official assessment system* yang bergantung sepenuhnya pada pemerintah dan berbeda dengan *self assessment system* yang bergantung pada wajib pajak. *Withholding system* saat ini banyak digunakan dalam beberapa pajak, seperti pada pemotongan PPh 21, pemotongan PPh 23, pemotongan PPh 26, pemotongan PPh 4 ayat (2), pemungutan PPh 22 sampai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh orang pribadi atau badan usaha yang telah dijelaskan dan ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2008. Kelompok UMKM dikasifikasikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi UMKM

Jenis Usaha	Aset Bersih	Omset Per-tahun
Usaha Mikro	Rp.0 – Rp 50 juta	Rp. 0 – Rp.300 juta
Usaha kecil	Rp.50 juta – Rp.500 juta	Rp.300 juta – Rp.2,5 miliar
Usaha menengah	Rp.500 juta – Rp.10 miliar	Rp.2,5 miliar – Rp.50 miliar

Sumber : UU No. 20 tahun 2008

Adanya penetapan undang-undang terkait dengan UMKM merupakan bentuk dukungan dari pemerintah kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan harapan para pelakunya dapat terus menerus memberikan kontribusi ekonomi terhadap Indonesia.

2.2.6 Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Adanya *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)* yang ditetapkan sebagai pandemi dunia sejak saat itu stabilitas ekonomi dan produktivitas para pelaku usaha terganggu. Penurunan ekonomi masyarakat Indonesia sangat dikhawatirkan, maka dari itu pemerintah berencana untuk memberikan insentif pajak sebagai upaya menanggulangi terdampak dari *covid-19*. Menindak lanjuti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor

23 tahun 2018 terkait pajak UMKM sebagai insentif pajak menjadi PPh final 0,5% sebelum adanya pandemi *covid-19*.

Adanya pandemi *covid-19* pemerintah mengeluarkan peraturan terkait insentif pajak begitupun untuk pajak final UMKM, pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku UMKM menjadi pajak final Ditanggung Pemerintah (DTP) yang telah dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03 tahun 2020. Peraturan ini diberlakukan selama 6 bulan yang terhitung dari bulan April sampai bulan September 2020 dan diperpanjang hingga akhir Desember 2020 dengan adanya peraturan ini maka pelaku UMKM tidak perlu menyetor pajak pada pemerintah karena pemerintah telah menanggung semua PPh final untuk para UMKM. Pemerintah juga telah memperpanjang insentif pajak dari bulan Februari 2021 hingga bulan Juni 2021 hal ini telah dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Diberlakukannya peraturan insentif pajak final ditanggung pemerintah diharapkan untuk para pelaku UMKM mampu bangkit dan mempertahankan usahanya ditengah pandemi. Selain itu pemerintah juga diharapkan naiknya kepatuhan pajak ditengah situasi pandemi.

2.2.7 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajaknya yang harus dituntaskan tanpa adanya paksaan dan diselesaikan dengan benar dan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran dari para wajib pajak sendiri akan membuat tingkat kepatuhan pajak akan meningkat dan akan menjadi keberhasilan dari adanya system perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dimulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak jika telah memiliki penghasilan, cara ini merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak yang pertama. Menyetor pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan selanjutnya, jika telah menjadi wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP maka sudah sepatutnya menyetorkan kewajiban pajaknya. Setelah menyelesaikan setoran pajak maka wajib pajak harus melaporkan pajaknya selama setahun terakhir.

Dengan adanya kesadaran dari para wajib pajak maka dapat meningkatkan jumlah kepatuhan pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak ditengah pandemi saat ini dengan tujuan mengharapkan para wajib pajak tetap melakukan kewajiban pajaknya meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mengharapkan para wajib pajak dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

2.2.8 Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan kata dari efektif yang artinya sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) adalah ada pengaruhnya, ada kesannya. Sedangkan menurut Mulyana (2009) efektivitas merupakan kaitan dari suatu organisasi atau lembaga dalam memanfaatkan dan mendapatkansumber daya dalam mewujudkan dari sebuah tujuan

operasional. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan sebuah pengukuran setelah tercapainya suatu usaha yang dilakukan, bahwa tugas yang dilaksanakan membawa manfaat dan pengaruh pada tugas-tugas selanjutnya. Menurut Abdurahmat (2008) efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang tertentu yang dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan selesai dan tercapai pada waktunya.

Mengukur efektivitas kepatuhan pajak yakni membandingkan antara wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang telah melaporkan SPT pajaknya. Mengukur tingkat kepatuhan pajak untuk mengetahui bahwa program insentif pajak yang telah dijalankan pemerintah dapat mempengaruhi dan menjadi manfaat bagi para wajib pajak. Mengukur tingkat keberhasilan program insentif pajak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para wajib pajak atau bahkan berbanding terbalik.

2.2.9 Pajak Dalam Prespektif Islam

Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan dengan الْعُسْرُ (Al-Usyr) atau الْمَكْسُ (Al-Maks) atau bisa juga disebut نَبْهٌ (Adh-Dharibah) yang artinya sendiri adalah “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak” berbeda apabila pajak disebut dengan الْخَرَجُ (Al-kharaj) yang biasa digunakan untuk penyebutan pungutan-pungutan yang khusus berkaitan dengan tanah. Pengambilan kata dari Dharaba dimana kata tersebut jika diartikan menjadi utang pajak, pajak tanah bahkan sering

disebut upeti yang harus dibayar, hal ini diungkapkan Syeikh Yusuf al-Qardhawi dalam buku Fiqh az-Zakah. Dalam bahasa arab sendiri untuk para pemungut pajaknya disebut صَا حِبُّ الْمُكْسِ (shahibul maks) atau الْعَشَّارُ (Al-Asysyar).

Pajak sejatinya telah dijelaskan oleh islam secara detail dan terperinci, dan islam telah menjelaskan melalui beberapa fiman Allah didalam Al-Qur'an yakni dalam surat At-Taubah ayat 29

قَتَلُوا الذِّنْنَ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالنُّومِ الْأَخْرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِيرُونَ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”. (QS At-Taubah : 29)

Surat At-Taubah ayat 41.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا أَبَاؤَكُمْ لَكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ
أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui” (QS At-Taubah : 41)

Dan terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ
وَالْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(QS Al-Baqarah : 195)

Selain itu Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan terkait pajak melalui HR.Tarmidzi dari Fathimah binti Qais RA. Dimana artinya berbunyi “Didalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat”.

Ayat-ayat tersebut memiliki makna bahwa kita sebagai manusia kita tidak boleh semena-mena dalam memakan harta sesama kita, karena sesungguhnya dalam rezeki kita terdapat hak orang lain yang harus kita keluarkan. Pajak adalah pungutan atas harta kita maka dari itu pajak merupakan salah satu cara dalam mengeluarkan hal yang batil dari harta kita. Dari penjelasan tersebut maka pemungutan pajak disesuaikan dengan syariat dan ketentuan agama islam untuk menghindari adanya penyimpangan dan kesalah pahaman. Dengan adanya bukti dan penjelasan pajak dari sumber-sumber yang terpercaya maka dari itu ulama-ulama islam menyetujui dengan adanya pemungutan dan pemotongan pajak.

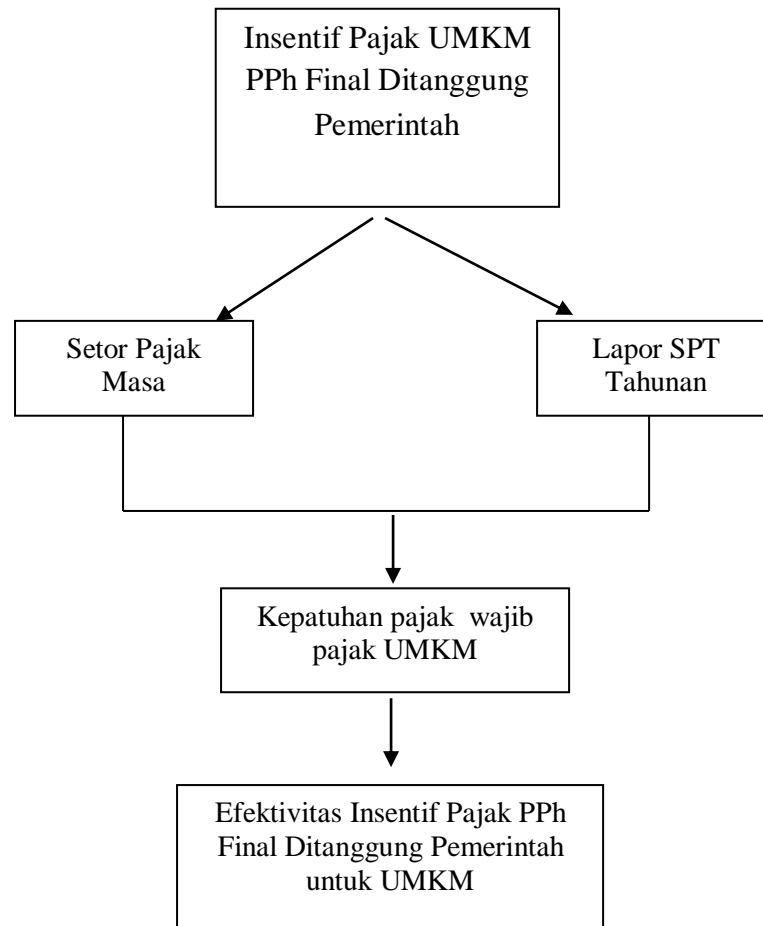
Dalam buku Pajak menurut *syari'ah* karangan Gusfahmi (2007), Syekh Abdul Qadir Zallum telah menjelaskan lima unsur penting pajak yang sesuai dengan ketentuan syari'at islam, yaitu:

1. Allah SWT telah mewajibkan
 2. Harta (Maal) menjadi objek dari pajak
 3. Semua kaum muslim yang berkecukupan menjadi subjek pajak
 4. Hasilnya sebagai pembiayaan seluruh umat muslim
 5. Dibayarkan karena adanya kebutuhan yang harus diselesaikan
- Ulil amri (pemimpin)

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori maka dapat disimpulkan bahwa dari tujuan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis efektifitas penerimaan pajak di Indonesia dengan diberlakukannya program Insentif pajak PPh Final yang ditanggung pemerintah untuk pelaku UMKM. Untuk memudahkan alur penelitian maka dijelaskan dengan bagan dibawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Dari kerangka berfikir tersebut menjelaskan bahwa dalam masa pandemi *covid-19* maka perekonomian bangsa tidak stabil dan menyebabkan penurunan produktivitas dari para pelaku UMKM, maka dari itu dengan adanya Insentif pajak PPh Final yang ditanggung pemerintah dapat menstimulus pelaku usaha untuk memotivasi para pelaku UMKM mematuhi kewajiban pajaknya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, kuisioner serta memiliki tujuan untuk menjelaskan terkait fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dimana data yang diperoleh yang kemudian dianalisis secara lebih mendalam sehingga dapat menjawab tujuan yang ingin disampaikan peneliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Malang Utara JL. Jaksa Agung Suprpto 29-31, Malang. Lokasi dipilih untuk mengedepankan daerah daripada peneliti terlebih dahulu dalam tingkat pengajuan program insentif pajak final UMKM ditanggung pemerintah.

3.3 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer menurut Barlian (2016) adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Perolehan data didapatkan dari kuisioner yang didistribusikan melalui web *e-riset* pajak dengan menggunakan *google formulir*.

Menurut Sugiyono (2014) data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dan didapatkan secara tidak langsung melalui dokumen

ataupun melewati orang lain. Data-data yang lain didapatkan dari olahan data KPP Pratama Malang Utara untuk mendukung penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hendaknya harus sistematis dengan karena tujuan utama sebuah penelitian adalah perolehan data yang akurat menurut Sugiyono (2017). Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode:

a. Metode Kuesioner

Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pernyataan atau pertanyaan secara tertulis yang disusun untuk ditujukan kepada para responden dengan tujuan untuk memperoleh sebuah informasi. File kuisinoner akan dibagikan dan didistribusikan untuk para wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara dengan responden mengisi sendiri. Kuisisioner didistribusikan melalui KPP Pratama Malang Utara dengan mengirimkan *google formulir* yang sebelumnya mendaftarkan penelitian melalui web *e-riset* pajak. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model kuisisioner *skala likert* yang bertujuan untuk mengungkap pendapat dan persepsi para responden. *Skala likert* memiliki 5 point dalam setiap point memiliki skor tersendiri dari angka 1 sampai angka 5. Dari hasil kuisisioner nantinya akan ditarik kesimpulan mengenai pandangan para responden.

b. Metode Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, dimana dengan mengumpulkan data-data yang tertulis yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

3.5 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Peresentase, dimana penelitian dilakukan untuk mengetahui persentase dengan menjelaskan terkait variabel dengan melakukan pengukuran secara objektif dan analisis secara numerikal.

3.5.1 Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Untuk menjamin data yang diperoleh valid maka diperlukan adanya pengujian validitas dari tiap-tiap kuesioner. Hal ini digunakan untuk menguji jawaban kuesioner dari responden dapat dikatakan valid atau tidak. Indikator yang digunakan untuk tingkat signifikansi yaitu 0,05 apabila nilai signifikansi lebih besar maka dapat dikatakan valid. Adapun kriteria-kriteria tertentu dalam pengujian validitas, yaitu:

- a. Apabila probabilitas taraf signifikansi $< 0,05$ atau

$r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan dianggap valid.

- b. Apabila probabilitas taraf signifikansi $> 0,05$ atau $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item pertanyaan dianggap tidak valid.

Untuk mencari r_{tabel} digunakan rumus sebagai berikut:

$$Df = n - 2$$

Keterangan:

$Df = \text{degree of freedom}$

$n = \text{jumlah sampel}$

a. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui jawaban kuesioner yang diberikan responden dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data yang andal. Apabila nilai dari variabel yang digunakan $> 0,6$ maka uji realibilitas dapat dinyatakan realibel. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS *for windows* dengan menggunakan rumus *Conbach's Alpha* dikarenakan penelitian yang digunakan kuisisioner dengan *skala likert* 1 sampai dengan 5.

3.5.2 Analisis Deskriptif

a. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan pengukuran untuk pemilihan tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi intinya efektivitas adalah pengukuran pencapaian dari suatu pekerjaan yang dilakukan dengan mengutamakan kualitas, kuantitas dan tenggat waktu tertentu. Memah (2013) merumuskan tingkat efektivitas, yakni:

jumlah UMKM lapor insentif pajak

Rasio Efektivitas = ----- x100%

Jumlah UMKM terdaftar

Tingkat efektivitas dapat dilihat dari hasil rasio efektivitas, jika hasil yang dicapai maksimal 100%, maka dapat menggambarkan bahwa diberlakukannya insentif pajak masa pandemi *covid-19* pada penerimaan pajak dikatakan baik. Efektivitas Penerimaan Pajak pada diperlakukan insentif pajak berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91% - 100%	Efektif
81% - 90%	Cukup Efektif
61% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP Pratama Malang Utara menjadi subjek penelitian, Kantor yang bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.29-31 kec. Klojen Kota Malang. KPP Pratama Malang Utara memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak langsung dalam wilayah kerjanya yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. KPP Pratama Malang Utara memiliki wilayah kerja pada kecamatan Lowokwaru dan kecamatan Blimbing.

Penelitian ini menggunakan *survey* kuisioner dalam mengumpulkan data, yang menjadi responden yakni para pelaku UMKM yang telah terdaftar dan memanfaatkan insentif pajak final UMKM ditanggung pemerintah di KPP Pratama Malang Utara. Kuisioner telah dibagikan kepada para responden dengan *google formulir* melalui web *e-riset pajak* pada tanggal 27 Mei 2021 hingga 12 Juni 2021. Dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa dari 98 kuisioner yang disebar hanya 46 kuisioner saja yang kembali. Berikut paparan hasil dari penyebaran kuisioner hingga pengembalian kuisioner:

Tabel 4.1
Paparan Kuisisioner

Keterangan	Jumlah
Kuisisioner Tersebar	100
Kuisisioner Terisi	46
Kuisisioner Tidak Kembali	54
Kuisisioner yang digunakan	46

Sumber: Data Primer Diolah

4.1.1 Deskripsi Responden

Secara umum para responden dikelompokkan berdasarkan dari jenis kelamin, jenis usaha, omset per tahun dan wilayah kecamatan. Berikut akan disajikan beberapa gambaran dan diagram distribusi dari persebaran kuisisioner yang telah disebar luaskan.

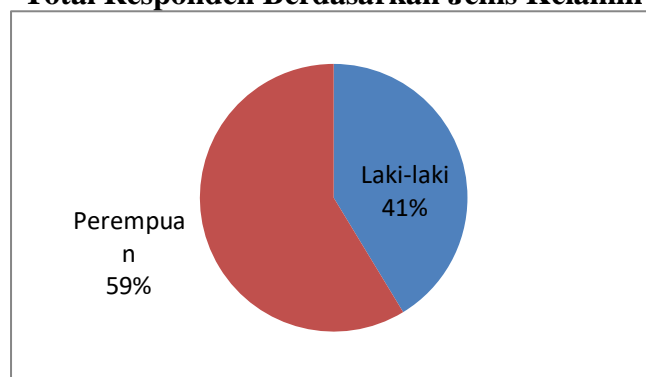
A. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Wajib Pajak Pelaku UMKM

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	19	41%
2.	Perempuan	27	59%
	Jumlah	46	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Gambar 4.1
Total Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel dan *pie chart* diatas diketahui bahwa responden yang mengisi kuisisioner terdapat 41% yang merupakan responden Laki-laki dan 59% responden perempuan. Dapat disimpulkan bahwa dari responden perempuan lebih mendominasi daripada responden laki-laki.

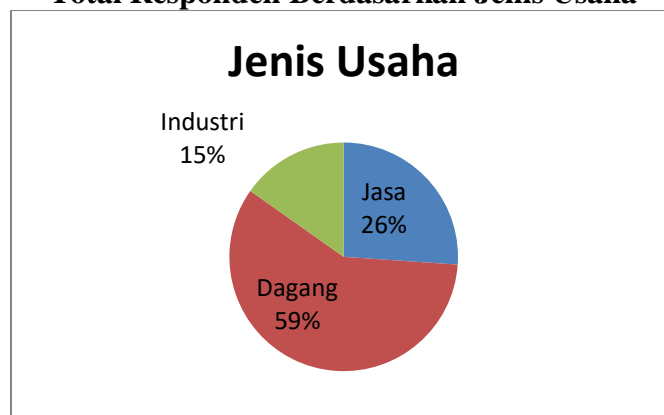
B. Karakteristik Jenis Usaha Responden

Tabel 4.3
Jenis Usaha pelaku UMKM

No.	Usaha	Jumlah	Persentase
1.	Dagang	12	59%
2.	Produksi	27	26%
3.	Industri	7	15%
	Jumlah	46	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Gambar 4.2
Total Responden Berdasarkan Jenis Usaha



Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel dan *pie chart* diatas bahwa UMKM dengan usaha Dagang memiliki 59%, jika dibandingkan dengan jenis usaha Industri yang hanya sebanyak 15% dan untuk Jasa terdiri dari 26%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa para responden lebih dominasi pada usaha dagang.

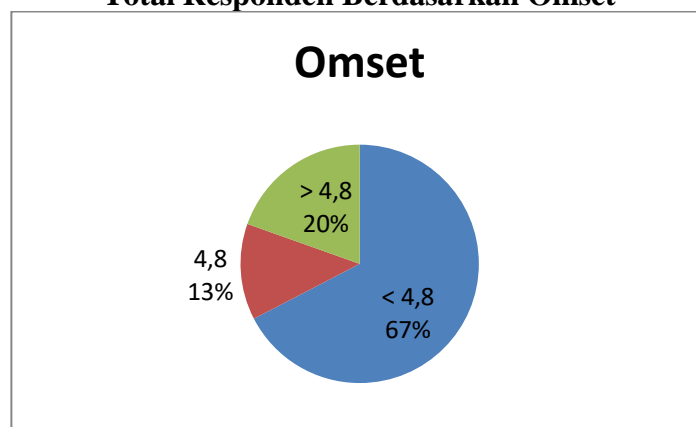
C. Karakteristik Omset Responden

Tabel 4.4
Omset Responden UMKM

No.	Omset	Jumlah	Persentase
1.	< 4,8 miliar	31	67%
2.	4,8 miliar	6	13%
3.	> 4,8 miliar	9	20%
	Jumlah	46	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Gambar 4.3
Total Responden Berdasarkan Omset



Sumber: Data Primer diolah 2021

Dilihat dari tabel dan *pie chart* diatas bahwa para pelaku UMKM kebanyakan memiliki omset kurang dari Rp.4,8 miliar mencapai 67%, untuk omset Rp 4,8 miliar bekisar 13%, dan untuk omset lebih dari Rp 4,8 miliar sebanyak 20%. Dapat disimpulkan bahwa responden lebih didominasi responden yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar.

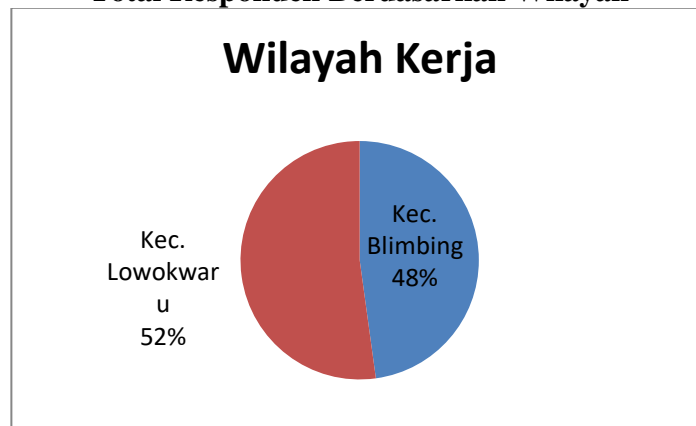
D. Wilayah Kerja

Tabel 4.5
Wilayah Kerja Responden

No.	Wilayah Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Kecamatan Blimbing	22	48%
2.	Kecamatan Lowokwaru	24	52%

	Jumlah		
--	--------	--	--

Gambar 4.4
Total Responden Berdasarkan Wilayah



Sumber : Data Primer Diolah tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel dan *pie chart* diatas bahwa responden di kecamatan Blimbing sebanyak 48%, jika dibandingkan dengan responden kecamatan Lowokwaru sebanyak 52% Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa para responden lebih didominasi pada responden di daerah kecamatan Lowokwaru.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif

Untuk mengetahui tingkat efektifitas insentif pajak Final UMKM yang ditanggung pemerintah dapat membantu para pelaku UMKM. Penelitian menggunakan kuisioner sebagai alat ukur dengan pemeberian skala pada setiap jawaban kuisioner. Pemeberian skala pada kuisioner ada 5 point, yaitu:

1. Nilai 5 untuk jawaban Sangat Setuju/Selalu
2. Nilai 4 untuk jawaban Setuju/Sering

3. Nilai 3 untuk jawaban Netral/Kadang-kadang
4. Nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju/Jarang
5. Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah

Sesuai dengan kuisioner yang telah didistribusikan pada pelaku UMKM di KPP Pratama Malang Utara. Berikut tanggapan dari para responden terkait insentif pajak final UMKM dan kepatuhan pajak.

A. Pemberian Insentif Pajak Final UMKM

Insentif pajak final UMKM yang ditanggung pemerintah dapat menjadi indikator pengetahuan terkait insentif pajak final untuk UMKM, yang kemudian dikemangkan dalam 5 item pernyataan kuisioner penelitian. Berikut data dari hasil penelitian yang dapat dianalisis.

Tabel 4.6
Frekuensi Jawaban Responden

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	0	0,0%	1	2,2%	12	26,1%	24	52,2%	9	19,6%	3,49
2	0	0,0%	6	13,0%	23	50,0%	16	34,8%	2	4,3%	3,59
3	0	0,0%	1	2,2%	14	30,4%	28	60,9%	4	8,7%	4,33
4	0	0,0%	1	2,2%	13	28,3%	25	54,3%	8	17,4%	3,73
5	0	0,0%	0	0,0%	11	23,9%	23	50,0%	13	28,3%	3,56
6	2	4,3%	3	6,5%	14	30,4%	16	34,8%	11	23,9%	2,55
7	2	4,3%	6	13,0%	6	13,0%	18	39,1%	14	30,4%	2,59
8	2	4,3%	5	10,9%	6	13,0%	19	41,3%	15	32,6%	2,83
9	1	2,2%	4	8,7%	12	26,1%	16	34,8%	14	30,4%	2,67
10	3	6,5%	2	4,3%	11	23,9%	18	39,1%	13	28,3%	2,73
mean											3,21

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden menjawab pernyataan dengan nilai skor dari 1,2,3,4, dan 5 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pernyataan pertama, dari semua responden berjumlah 46 diketahui sebanyak 1 orang menjawab tidak setuju, 12 orang menjawab netral, 24 orang menjawab setuju, 9 orang menjawab sangat setuju, dan tidak responden yang menjawab sangat tidak setuju. Jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa setuju dengan pernyataan bahwa wajib pajak mengerti dan paham adanya program insentif pajak final UMKM yang ditanggung pemerintah.
- b. Dari pertanyaan kedua dapat diketahui dari 46 responden tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 6 orang menjawab tidak setuju, 23 orang menjawab netral, 16 orang menjawab setuju, dan ada 2 orang menjawab sangat setuju. Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa syarat dan ketentuan pengajuan insentif pajak masih dirasa susah dan dirasa mudah karena responden menjawab paling banyak pada skala netral.
- c. Pernyataan ketiga dapat diketahui dari 46 responden tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang menjawab tidak setuju, 14 orang menjawab netral, 28 orang menjawab setuju, dan 4 orang menjawab sangat setuju. Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa sebagian responden setuju jika adanya insentif pajak final untuk UMKM membuat para wajib pajak

termotivasi dalam melaporkan SPT masa dan SPT tahunannya secara tepat waktu.

- d. Pernyataan keempat dapat diketahui dari 46 responden tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, tidak ada responden menjawab tidak setuju, 13 orang menjawab netral, 25 orang menjawab setuju, dan 8 orang responden menjawab sangat setuju. Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa sebagian responden merasa setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya program insentif pajak final UMUM di masa pandemi *covid-19* para wajib pajak merasa sangat terbantu.
- e. Pernyataan kelima dapat diketahui dari 46 responden tidak ada responden menjawab sangat tidak setuju, 2 orang responden menjawab tidak setuju, 11 orang responden menjawab netral, 23 orang responden menjawab setuju, dan 13 orang menjawab sangat setuju. Dapat disimpulkan dari jawaban responden bahwa sebagian responden merasa setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya insentif pajak merupakan program yang efektif dalam meningkatkan para wajib pajak untuk patuh pajak.
- f. Pernyataan keenam dapat diketahui dari 46 responden terdapat 2 orang menjawab tidak pernah, 3 orang menjawab jarang, 14 orang menjawab kadang-kadang, 16 orang menjawab menjawab sering, dan 11 menjawab selalu. Dapat disimpulkan dari jawaban

responden bahwa para responden masih sering dan selalu menyetor kewajiban pajaknya meskipun di masa pandemi *covid-19*.

- g. Pernyataan ketujuh dapat diketahui dari 46 responden terdapat 2 orang menjawab tidak pernah, 6 orang menjawab jarang, 6 orang menjawab kadang-kadang, 18 orang menjawab sering, dan 14 orang menjawab selalu. Dapat disimpulkan dari jawaban responden bahwa para responden masih sering dan selalu melapor SPT pajak masa dan SPT pajak tahunan di masa pandemi *covid-19*.
- h. Pernyataan kedelapan dapat diketahui dari 46 responden terdapat 2 orang menjawab tidak pernah, 5 orang menjawab jarang, 6 orang menjawab kadang-kadang, 19 orang menjawab sering, dan 15 orang menjawab selalu. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden masih sering dan selalu menyetorkan kewajiban pajak secara sukarela tanpa ada paksaan sebagai wujud patuh pajak.
- i. Pernyataan kesembilan dapat diketahui dari 46 responden terdapat 1 orang menjawab tidak pernah, 4 orang menjawab jarang, 12 menjawab kadang-kadang, 16 orang menjawab sering, 14 orang menjawab selalu. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden masih sering dan selalu melaporkan SPT secara sukarela tanpa ada paksaan sebagai wujud patuh pajak.
- j. Pernyataan kesepuluh dapat diketahui dari 46 responden terdapat 3 orang menjawab tidak pernah, 2 orang menjawab jarang, 11 orang menjawab kadang-kadang, 18 orang menjawab sering, dan 13 orang

menjawab selalu. Dapat disimpulkan bahwa para responden tidak memanipulasi data untuk menghindari jumlah pajak yang tinggi.

Hasil deskripsi dari insentif pajak final UMKM terhadap kepatuhan pajak mayoritas jawaban responden setuju dengan nilai mean sebesar 3,21. Ini menunjukkan bahwa responden memberikan respon positif terhadap adanya insentif pajak final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.2 Rasio Efektivitas Insentif Pajak Final UMKM

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari program insentif pajak Final UMKM yang khususnya untuk jilid pertama pada penelitian ini dikhususkan pada wilayah KPP Pratama Malang Utara. Berikut paparan data UMKM yang Terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara:

Tabel 4.9
UMKM Terdaftar dan UMKM Lapor SPT
Tahun 2018-2020

Tahun	UMKM Terdaftar	UMKM Lapor SPT	Kepatuhan (%)
2018	3.788	3.008	79,4%
2019	4.236	3.393	80,1%
2020	4.501	3.568	79,3%

Sumber : Data Primer diolah 2021

Berdasarkan pada tabel 4.9 terjadi kenaikan kepatuhan dari para wajib pajak UMKM di tahun 2019 dibandingkan dengan

UMKM lapor SPT pada tahun 2018 dari 79,4% tingkat kepatuhan menjadi 80,1%, dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 semula 80,1% turun menjadi 79,3%. Dilihat bahwa penurunan terjadi pada tahun 2020 tepatnya saat pemberlakuan insentif pajak final DTP untuk UMKM.

Berikut ini adalah data dari wajib pajak UMKM yang mengajukan program Insentif pajak selama bulan April hingga bulan Desember tahun 2020.

Tabel 4.10
Jumlah Pengguna Insentif Pajak
April 2020 – Desember 2020

No.	Bulan	Frekuensi
1.	April	7
2.	Mei	933
3.	Juni	70
4.	Juli	34
5.	Agustus	35
6.	September	24
7.	Oktober	22
8.	November	22
9.	Desember	12
	Jumlah	1.159

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Dapat dilihat dari tabel 4.10 terdapat jumlah wajib pajak UMKM yang mengajukan insentif pajak final DTP mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada bulan mei 2020, namun

mengalami penurunan pada bulan-bulan berikutnya. Dalam penelitian ini menggunakan rasio efektifitas insentif pajak PPh Final DTP, maka rumus yang digunakan adalah perbandingan antara jumlah wajib pajak UMKM yang mengajukan insentif pajak final dengan jumlah wajib pajak terdaftar UMKM, dengan asumsi adanya program insentif pajak dapat membuat seluruh wajib pajak melaksanakan kepatuhan wajib pajak dengan melapor SPT pajak.

Untuk meninjau tingkat efektivitas pemberian insentif pajak final DTP untuk UMKM, maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{jumlah UMKM lapor insentif pajak}}{\text{Jumlah UMKM terdaftar}} \times 100\%$$

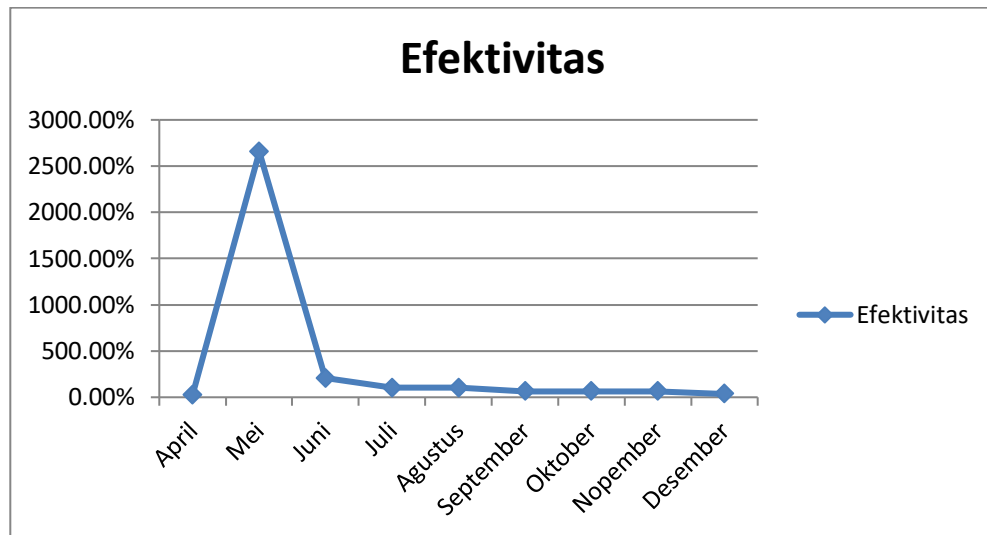
Berikut ini adalah hasil dari tingkat efektivitas adanya program insentif pajak PPh Final ditanggung pemerintah.

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Efektivitas Insentif Pajak Final UMKM

No.	Bulan	Jumlah UMKM dg Insentif	Jumlah UMKM Terdaftar	UMKM dg Insentif/ Jumlah UMKM	Target RasioKepatuhan UMKM per KPP	Efektifitas
1.	April	7	4.501	0,20%	0,78%	25,64%
2.	Mei	933	4.501	20,70%	0,78%	2653,85%
3.	Juni	70	4.501	1,60%	0,78%	205,13%
4.	Juli	34	4.501	0,80%	0,78%	102,56%
5.	Agustus	35	4.501	0,80%	0,78%	102,56%
6.	September	24	4.501	0,50%	0,78%	64,10%
7.	Oktober	22	4.501	0,50%	0,78%	64,10%
8.	November	22	4.501	0,50%	0,78%	64,10%
9.	Desember	12	4.501	0,30%	0,78%	38,46%

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Gambar 4.5
Tingkat Efektivitas Insentif Pajak terhadap Kepatuhan



Sumber : Data Primer diolah 2021

Dilihat dari tabel 4.11 dari jumlah wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Malang Utara terdaftar sebanyak 4.501 selama tahun 2020. Berdasarkan dari tabel pada bulan Mei mengalami peningkatan sangat tinggi yakni tingkat efektivitas sebesar 2653,85% dan dinyatakan sangat efektif. Namun pada bulan bulan selanjutnya tingkat efektivitas semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari gambar 4.5 yang menggambarkan grafik dari tingkat efektivitas yang semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya tingkat rasio untuk kepatuhan pajak.

4.2.3 Uji Instrumen

Uji instrumen dilakukan kepada 46 responden dengan memperhatikan karakteristik responden bahwa responden termasuk dalam wajib pajak UMKM.

4.2.3.1 Uji Validitas

Analisis uji validitas dari variabel insentif pajak PPh Final DTP dan variabel kepatuhan pajak terdiri dari 10 item pernyataan yang merupakan jawaban dari responden. Adanya analisis validitas untuk mengetahui jawaban kuisioner dari para responden dapat dikatakan valid atau tidak. Dalam pengujian validitas ini menggunakan teknik *product moment pearson correlation* dan menggunakan pedoman indikator r_{tabel} sebesar 0,290.

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Pernyataan Kuisioner

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Nilai Sig.	α	Interpretasi
1	0,641	> 0,290	0,000	< 0,05	Valid
2	0,405	> 0,290	0,000	< 0,05	Valid
3	0,727	> 0,290	0,000	< 0,05	Valid
4	0,685	> 0,290	0,000	< 0,05	Valid
5	0,622	> 0,290	0,000	< 0,05	Valid
6	0,842	> 0,290	0,000	< 0,05	Valid
7	0,928	> 0,290	0,000	< 0,05	Valid
8	0,872	> 0,290	0,000	< 0,05	Valid
9	0,889	> 0,290	0,000	< 0,05	Valid
10	0,639	> 0,290	0,000	< 0,05	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Dari hasil tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang diuji memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan semua pernyataan memiliki nilai sigma $< 0,05$. Maka dapat dikatakan semua item pernyataan kuisioner Valid⁴

4.2.3.2 Uji Reliabilitas

Analisis uji reliabilitas adalah uji untuk mengetahui data dari responden bahwa jawaban yang dikumpulkan andal atau dapat dipercaya. Dalam pengujian reliabilitas memiliki pedoman dengan menggunakan uji *cronbach alpha* dan dapat dikatakan reliabel apabila nilai koefisien reliabilitas $> 0,60$.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliability	N of Cases	N of item	Keterangan
Insentif pajak	0,751	46	5	Reliabel
Kepatuhan pajak	0,814	46	5	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel 4.7 menunjukkan nilai dari *cronbach's alpha* dari 5 item pernyataan mendapat nilai 0,814 dan 0,751 yang dapat ditunjukkan lebih dari 0,60 maka dapat dikatakan item pernyataan dalam kuisioner ini “Reliabel”.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis

Kepatuhan wajib pajak adalah hal yang sangat berperan penting dalam bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak. Pada masa-masa sulit seperti sekarang ini adanya pandemi covid-19, terjadi kemunduran

ekonomi secara global. Demi mempertahankan ekonomi pemerintah melakukan kebijakan untuk para UMKM agar tetap bisa mempertahankan usahanya, dengan dikeluarkannya kebijakan insentif pajak Final ditanggung pemerintah (DTP) para UMKM tidak perlu lagi menyetorkan pajak yang seharusnya. Pembebasan pajak final untuk para UMKM yang dikeluarkan pemerintah mengharapkan bahwa UMKM untuk terus tetap patuh terhadap kewajiban pajak, yakni dengan melaporkan SPT pajak masa maupun tahunan, dikarenakan hal ini menjadi entuk tanggung jawab bagi setiap wajib pajak.

Insentif Pajak final DTP untuk UMKM ini telah diatur pada PMK No 44/PMK.03/2020 hal ini disebut sebagai upaya pemerintah mempertahankan ekonomi UMKM karena teringat bahwa UMKM merupakan sumber ekonomi yang mampu dengan berkembang dengan cepat. Namun rencana yang baik belum tentu disambut dengan baik, hal ini berhubungan dengan faktor-faktor yang nantinya membut rencana tidak dapat maksimal.

4.3.1 Efektivitas Insentif Pajak Final Ditanggung Pemerintah UMKM

Dari hasil perhitungan efektivitas adanya insentif PPh Final ditanggung pemerintah untuk UMKM pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa program Insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah 2020 termasuk kurang efektif. Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 4.12
InterpretasiEfektivitas

No.	Bulan	Tingkat Efektivitas	Kriteria
1.	April	25,64%	Tidak Efektif
2.	Mei	2653,85%	Sangat Efektif
3.	Juni	205,13%	Sangat Efektif
4.	Juli	102,56%	Sangat Efektif
5.	Agustus	102,56%	Sangat Efektif
6.	September	64,10%	Kurang Efektif
7.	Oktober	64,10%	Kurang Efektif
8.	November	64,10%	Kurang Efektif
9.	Desember	38,46%	Tidak Efektif

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.12 bahwa ada 2 bulan yang dikatakan tidak efektif, yakni pada bulan April dan bulan Desember yang persentase efektivitasnya kurang dari 60% dikarenakan jumlah wajib pajak yang mengajukan program ini juga sedikit sehingga dikatakan tidak efektif. Untuk tingkat kurang efektif terdapat 3 bulan yakni pada bulan September, Oktober, dan November selama 3 bulan berturut-turut mendapatkan jumlah persentase yang sama yakni 64,10% karena jumlah pengajuan UMKM dalam range yang hampir sama. 4 bulan dinyatakan sangat efektif dikarenakan dari hasil persentase efektivitas mencapai lebih dari 100%, ini terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus.

4.4 Kendala Penelitian

1. Peneliti sadar memiliki keterbatasan dalam kemampuan penelitian khususnya dalam pengolahan data, namun peneliti berusaha mengerjakan semaksimal mungkin.

2. Keterbatasan waktu dalam pengambilan data penelitian merupakan pengaruh terbesar dalam pelaksanaan penelitian.
3. Keterbatasan waktu juga membuat kuisioner tidak terkumpul sesuai dengan yang diharuskan, tapi dengan kuisioner yang ada peneliti mampu mengolah sebaik-baiknya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

Diketahui bahwa program insentif pajak final ditanggung pemerintah untuk UMKM Jilid 1 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara secara keseluruhan belum bisa dinyatakan efektif seluruhnya. Masa pajak dari bulan April hingga Desember tahun 2020 pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100% maka dapat dinyatakan bahwa bulan tersebut Sangat Efektif. Bulan September, Oktober dan November mendapatkan hasil persentase lebih dari 60% maka dinyatakan Kurang Efektif. Bulan April dan Desember memiliki tingkat persentase terendah dibawah 60% sehingga dinyatakan Tidak Efektif. Dari 9 bulan masa insentif pajak, bulan Mei mendapatkan tingkat persentase efektivitas paling tinggi, yakni sebesar 2653,85% karena memang lonjakan permohonan insentif pajak untuk UMKM sangat tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis penelitian diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang diberikan yaitu, sebagai para UMKM hendaknya dapat memanfaatkan program Insentif pajak di masa pandemi saat ini. Untuk mengajukan Insentif pajak para UMKM ada beberapa ketentuan, berikut ini syarat dan cara untuk mengajukan insentif PPh final UMKM:

- a. Sebelumnya telah mengajukan dan memiliki surat keterangan PP 23
- b. Pengajuan dilakukan dengan “*login*” pada laman DJP online untuk masuk pada “layanan – info KSWP” dan klik “profil pemenuhan kewajiban saya” dan pilih menu fasilitas yang ingin dimanfaatkan.
- c. UMKM diharuskan membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak yang didalamnya terdapat PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh termasuk dengan transaksi dari pemotong atau pemungut.
- d. Untuk para pemotong atau pemungut harus memiliki Surat Setoran Pajak atau dari cetakan kode *billing* yang telah ada cap “PPh Final Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor.../PMK.03/2020” untuk transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.
- e. Untuk laporan realisasi PPh Final DTP dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau dari cetakan kode *billing* dan harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak.

Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim dan terjemahan

A, Muri Yusuf. 2014. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”*. Jakarta: Prenadamedia group.

Abdurahmat. 2008. *“Efektivitas Organisasi Edisi Pertama”*. Penerbit Airlangga, Jakarta.

Araujo, Miguel de., Ni Luh Putu Wigagustini., IB Anom Purbawangsa.(2018). *“Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili”*. Diperoleh 12 Februari 2021. Dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/44312>

Barlian Eri.(2016). *Metode Peneliian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang:Suka Bina Press

Chaniago, Andre. 2018. *“Hukum Membayar Pajak Menurut Yusuf Qardhawi.Skripsi”*. UIN Raden Fatah. Palembang.

Fitriani, Feni Freycineta. (2020). *“Parah! Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya 2,9 Persen Kuartal I/2020”*. Diperoleh 15 Desember 2020. Dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/9/1236510/parah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-hanya-29-persen-kuartal-i2020>

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari’ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hadits Riwayat Tarmidzi

Kusyeni, RD.,Nur Sari, Ratih Kumala, Zainal Arifin Yurdani. (2021). *“Efektivitas Program Earmarking Tax atas Pajak Rokok untuk Kesadaran Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta”*. Diperoleh 27 Mei 2021. Dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Efektivitas+Program+Earmarking+Tax+Atas+Pajak+Rokok+Untuk+Kesadaran+Dala+m+Upaya+Kesehatan+Masyarakat+di+Provinsi+DKI+Jakarta&btnG=

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Memah, Edward. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Reaksasi Pajak untuk UMKM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif Pajak untuk UMKM Terdampak Covid-19

Pricilia, Monita., dkk (2015). "*Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kota Mobagu*". Diperoleh 16 mei 2021. Dari <https://scholar.google.com/scholar>

Putri, Nabilah Jasmin Prasmaning., Syaiful Iqbal.(2018). "*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018*". Diperoleh 26 Januari 2021. Dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/21637>

Rahayu, Siti. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba

Rizal, Jawahir Gustav. (2020). "*Update Corona Dunia 21Desember: 77 Juta Kasus Covid-19Travel Ban untuk Inggris*". Diperoleh 12 Januari 2020. Dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/21/085700565/update-corona-dunia-21-desember--77-juta-kasus-covid-19-travel-ban-untuk?page=all>

Siregar, Boyke P. (2020). "*Kekurangan Penerimaan Pajak Hingga Akhir Tahun Hampir Rp388 Triliun*". Diperoleh 5 Januari 2020. Dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read287037/kekurangan-penerimaan-pajak-hingga-akhirtahun-hampir-rp388-triliun>

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sunanto.(2016). "*Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan*". Diperoleh 27 Mei 2021. Dari <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/200>

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-22/PJ/2020 Tentang Relaksasi Administrasi Pajak.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Sistem Pemungutan Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak dan Kontribusi Pajak

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan Menggunakan *Withholding System*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Widyaningsih, Arisanti. 2016. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta

Wiguna, Dewa Ketut Sudiarta. (2020). “*Corona dan Ekonomi Dunia yang Merana*”. Diperoleh 27 Desember 2020. Dari <https://www.antaranews.com/berita/1793745/corona-dan-ekonomi-dunia-yang-merana>

www.pajak.go.id

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Kuisisioner

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pertanyaan yang telah dirumuskan berkaitan dengan pengetahuan keterkaitan insentif pajak, sosialisasi pajak, dan kepatuhan para wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert yang terdiri dari 5 point dari 1 sampai 5 dengan keterangan, yaitu :

- a. *Sangat Tidak Setuju*
- b. *Tidak Setuju*
- c. *Netral*
- d. *Setuju*
- e. *Sangat Setuju*

selain itu juga menggunakan skala likert lain, yaitu :

- a. *Tidak pernah*
- b. *jarang*
- c. *Kadang-kadang*
- d. *Sering*
- e. *Selalu.*

B. Identitas Responden

1. Nama : _____(opsional)
2. Jenis Kelamin : Laki – laki ☐ Perempuan ☐
3. Omset : ☐ < Rp.4,8 miliar
☐ = Rp.4,8 miliar
☐ > Rp.4,8 miliar
4. Apakah anda merupakan UMKM terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak?
☐ iya (lanjutkan) ☐ tidak (berhenti/kirim)
5. Wilayah Kerja (Kecamatan) : _____

C. Kuesioner

Insentif Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sebagai wajib pajak saya mengerti dan paham dengan adanya program insentif pajak final UMKM ditanggung pemerintah					
2.	Sebagai wajib pajak saya merasa jika syarat dan ketentuan untuk pengajuan insentif pajak UMKM sangat mudah					

3.	Dengan adanya insentif pajak untuk UMKM membuat saya menjadi termotivasi untuk lapor SPT masa dan SPT tahunan tepat waktu					
4.	Sebagai wajib pajak saya sangat terbantu dengan adanya insentif pajak untuk pelaku UMKM di masa pandemi covid-19					
5.	Menurut saya dengan adanya insentif pajak merupakan hal efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19					

Kepatuhan Pajak

No.	Pernyataan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
1.	Saya menyetor pajak saya secara tepat waktu meskipun disaat pandemi covid-19					
2.	Saya melaporkan SPT pajak masa dan SPT tahunan secara tepat waktu meskipun masa pandemi covid-19					
3.	Saya menyetor kewajiban pajak saya secara sukarela tanpa adanya paksaan					
4.	Saya melaporkan SPT masa dan SPT tahunan saya secara sukarela tanpa adanya paksaan					
5.	Saya tidak memanipulasi data perpajakan untuk menghindari jumlah pajak yang terlalu besar selama di masa pandemi covid-19					

Lampiran 2 Hasil Jawaban Kuisisioner dari Responden

No.	KepatuhanPajak					InsentifPajak				
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
1	3	5	5	5	5	4	4	4	3	3
2	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
3	5	5	5	5	4	5	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3
6	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4
7	3	5	4	3	4	4	3	3	3	3
8	5	5	5	5	5	5	3	4	3	5
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

10	5	4	4	3	3	3	3	4	3	4
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	4	4	4	3	3	3	3	4	4	5
13	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5
14	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
15	2	3	4	4	3	3	3	4	5	4
16	2	2	2	3	2	5	3	4	4	5
17	3	3	4	2	3	4	4	4	5	4
18	1	1	1	1	5	3	4	3	4	3
19	5	4	1	4	4	4	2	4	4	4
20	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3
21	3	2	2	3	3	2	5	3	3	3
22	3	2	3	4	4	4	2	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
24	4	4	4	4	4	5	2	4	4	5
25	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
26	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4
27	4	4	4	3	4	3	3	3	5	5
28	4	2	2	3	3	3	3	2	2	5
29	3	5	5	5	5	4	3	5	5	5
30	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4
31	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	5	4	5	4	5	3	2	4	4	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	3	4	5	5	4	4	3	3	4	3
36	5	5	5	5	5	5	3	4	3	5
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	3	4	2	3	4	4	4	5	4
39	3	5	5	5	5	4	4	5	5	5
40	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	2	2	2	2	2	3	4	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
44	5	5	5	5	1	4	4	5	4	4
45	5	5	5	5	1	4	4	4	4	4
46	1	1	2	2	1	5	4	4	4	4

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Insentif Pajak

Correlations

		item pertanyaan n 1	item pertanyaan 2	item pertanyaan 3	item pertanyaan 4	item pertanyaan 5	Skor Total
item pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	-,050	,415**	,258	,384**	,641**
	Sig. (2- tailed)		,751	,004	,084	,008	,000
	N	46	42	46	46	46	46
item pertanyaan 2	Pearson Correlation	-,050	1	,232	,189	-,159	,405**
	Sig. (2- tailed)	,751		,139	,230	,315	,008
	N	42	42	42	42	42	42
item pertanyaan 3	Pearson Correlation	,415**	,232	1	,636**	,498**	,727**
	Sig. (2- tailed)	,004	,139		,000	,000	,000
	N	46	42	46	46	46	46
item pertanyaan 4	Pearson Correlation	,258	,189	,636**	1	,433**	,685**
	Sig. (2- tailed)	,084	,230	,000		,003	,000
	N	46	42	46	46	46	46
item pertanyaan 5	Pearson Correlation	,384**	-,159	,498**	,433**	1	,622**
	Sig. (2- tailed)	,008	,315	,000	,003		,000
	N	46	42	46	46	46	46
Skor Total	Pearson Correlation	,641**	,405**	,727**	,685**	,622**	1
	Sig. (2- tailed)	,000	,008	,000	,000	,000	
	N	46	42	46	46	46	46

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak

Correlations

		item pertanyaan 1	item pertanyaan 2	item pertanyaan 3	item pertanyaan 4	item pertanyaan 5	Skor Total
item pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	,776**	,644**	,740**	,364*	,842**
	Sig. (2- tailed)		,000	,000	,000	,013	,000
	N	46	46	46	46	46	46
item pertanyaan 2	Pearson Correlation	,776**	1	,832**	,793**	,461**	,928**
	Sig. (2- tailed)	,000		,000	,000	,001	,000
	N	46	46	46	46	46	46
item pertanyaan 3	Pearson Correlation	,644**	,832**	1	,750**	,400**	,872**
	Sig. (2- tailed)	,000	,000		,000	,006	,000
	N	46	46	46	46	46	46
item pertanyaan 4	Pearson Correlation	,740**	,793**	,750**	1	,436**	,889**
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000		,002	,000
	N	46	46	46	46	46	46
item pertanyaan 5	Pearson Correlation	,364*	,461**	,400**	,436**	1	,639**
	Sig. (2- tailed)	,013	,001	,006	,002		,000
	N	46	46	46	46	46	46
Skor Total	Pearson Correlation	,842**	,928**	,872**	,889**	,639**	1
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	46	46	46	46	46	46

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas

Insentif Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,751	5

Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,814	6

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Siti Ruvy Maywulan Safitri
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 25 Mei 1998
Alamat : Jl. Plaosan Timur RT.04 RW.12 Kel. Purwodadi
Kec. Blimbing, Malang (65125)
Telepon : 0895360708424
Email : sitiruvy@gmail.com
Instagram : @ruvy_may

Pendidikan Formal

2003 – 2005 : TK Al-Fath Malang
2005 – 2011 : SD Negeri Pandanwangi 3 Malang
2011 – 2014 : SMP Negeri 20 Malang
2014 – 2017 : SMK Negeri 1 Malang (Akuntansi)
2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2017 : Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi
2017 – 2018 : Ma'had Sunan Ampel Al-,Aly
2017 – 2018 : Program Pendidikan Bahasa Arab (PPBA) UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2018 – 2019 : Program Pendidikan Bahasa Inggris (PPBI) UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2020 : Pelatihan Program Akuntansi MYOB.
Laboratorium Akuntansi dan Pajak Fakultas
Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BUKTI KONSULTASI

NIM 17520072
Nama :SITI RUVI MAYWULAN SAFITRI
Fakultas/Jurusan :EKONOMI/AKUNTANSI
DosenPembimbing1 :SRI ANDRIANI,SE.,M.Si
JudulSkripsi : Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap
Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi *Covid-19*
pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD
1.	12 Okt 2020	Pengajuan Outline	1.
2.	19 Des 2020	Bimbingan outline	2.
3.	24 Des 2020	Bimbingan Bab 1	3.
4.	25 Jan 2021	Bimbingan Proposal	4.
5.	26 Jan 2021	Bimbingan Proposal	5.
6.	05 Feb 2021	Pelaksanaan Seminar Proposal	6.
7.	15 Feb 2021	Pegiriman Hasil Revisi	7.
8.	19 Feb 2021	Pelaksanaan ujian Komperhensif	8.
9.	20 Feb 2021	ACC Revisi dari setiap Penguji	9.
10.	28 Mar 2021	Bimbingan Bab 4	10.
11.	17 Juni 2021	Bimbingan Bab 4-5	11.
12.	20 Juni 2021	Persiapan Sidang	12.
13.	27 Juni 2021	Pelaksanaan Sidang Skripsi	13.
14.	5 Juli 2021	Bimbingan Skripsi	14.
15.	12 Juli 2021	ACC Revisi dari setiap Penguji	15.

Malang, 18 Juli 2021

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP. 19720322-200801 2 005